



PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT: PENGARUH SINERGIS JUMLAH PENDUDUK DAN BELANJA NEGARA

Dewi Arhaninka¹⁾; Masruri Muchtar²⁾; Pardomuan Robinson Sihombing³⁾ Muhammad Heru Akhmadi⁴⁾

¹⁾ *inka_4122230022@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

²⁾ *masruri.m@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

³⁾ *robinson@bps.go.id, Badan Pusat Statistik*

⁴⁾ *heruakhmadi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

Abstract

The government can generate revenue and regulate expenditure allocations through fiscal policy to impact economic growth positively. Most central and regional government expenditures originate from the National Budget (APBN), which consistently exhibits a positive upward trend annually. This study aims to analyze the influence of population size and government spending sourced from the APBN on the economic growth of districts/cities in West Sumatera. Data sources for this research were obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of West Sumatera and the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The method employed is the panel data including 19 districts/cities in West Sumatera over five years, from 2017 to 2021, resulting in 95 observations used in this study. The findings indicate that the population size and operational spending positively affect growth. In contrast, capital expenditure and transfer spending do not significantly impact the economic growth of districts/cities in West Sumatera. It implies the necessity for close collaboration between the central and local governments to ensure that allocations for capital expenditure and transfer spending are tailored to the specific needs and development priorities of the districts/cities in West Sumatera.

Keywords: *Capital Expenditure; Economic Growth; Operational Expenditure; Population Size; Transfer Expenditure*

Abstrak

Pemerintah melalui kebijakan fiskalnya dapat mengupayakan pendapatan dan mengatur alokasi belanja agar berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hampir sebagian besar pengeluaran pemerintah pusat dan daerah berasal dari APBN dan selalu mengalami tren kenaikan positif setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk serta belanja pemerintah yang bersumber dari APBN mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian menggunakan metode data panel dengan sampel sebanyak 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam rentang waktu lima tahun, mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sehingga jumlah observasi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 95 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan belanja operasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan, sedangkan belanja modal dan belanja transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini mengimplikasikan perlunya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin bahwa alokasi untuk belanja modal dan belanja transfer disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan yang spesifik bagi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Kata Kunci: *Belanja Modal; Belanja Operasional; Belanja Transfer; Jumlah Penduduk; Pertumbuhan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan (Rahmat, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun mencerminkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terus meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif mencerminkan penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut teori Keynes, peranan aktif pemerintah dalam ekonomi negara dianggap



krusial untuk mengoptimalkan proses pembangunan ekonomi. Perspektif Keynes menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat dicapai melalui implementasi kebijakan moneter—seperti pengaturan suku bunga dan penyesuaian jumlah uang yang beredar—serta kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan sistem perpajakan dan peningkatan belanja pemerintah (Candra Fajri Ananda, 2023). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk melihat tingkat keberhasilan suatu proses pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, dimana dalam hal ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Styawan, 2021).

Dalam konteks kebijakan fiskal, peran pemerintah dalam sebuah negara tercermin dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua instrumen ini berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan menjadi acuan utama dalam proses penganggaran yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional. Di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat dikenal dengan potensi ekonominya yang besar, mulai dari pertanian sampai pariwisata. Setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat mempunyai ciri khas tersendiri yang turut andil dalam menggerakkan ekonomi daerahnya. Saat ini, Sumatera Barat sedang berusaha keras melakukan berbagai pembangunan untuk memajukan ekonominya. Dukungan dari pemerintah sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Sumatera Barat. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai kebijakan untuk memastikan pembangunan ekonomi bisa berjalan secara berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat (Rachmawati, 2019). Provinsi Sumatera Barat secara administratif memiliki 19 kabupaten/kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,34 persen menurun perlahan sampai tahun 2019 menjadi 5,01%, dan turun tajam pada tahun 2020 menjadi -1,61 persen hal tersebut turut diduga ditenggarai oleh pandemi *Covid-19* diawal tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2017	5,30
2018	5,14
2019	5,01
2020	-1,61
2021	3,29
2022	4,36

Sumber: BPS Sumatera Barat

Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Sumatera Barat yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Isu demografis menuntut perhatian serius dari pemerintah mengingat pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung di 19 kabupaten/kota di wilayah tersebut sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Sumatera Barat

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2017	5.321.489



2018	5.382.077
2019	5.441.197
2020	5.534.472
2021	5.580.232
2022	5.640.629

Sumber: BPS Sumatera Barat

Tantangan yang dihadapi pemerintah tidak hanya terkait dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga bagaimana memanfaatkan peningkatan jumlah penduduk tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penduduk menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian yang akan menyebabkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat. Hal ini sejalan dengan Yunianto (2021) yang menemukan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Samarinda. Sebelumnya, Rochaida (2016) mendapati bahwa meningkatnya jumlah penduduk di Kalimantan Timur membawa perkembangan bagi perekonomian.

Hampir sebagian besar pengeluaran pemerintah pusat dan daerah berasal dari APBN, dengan klasifikasi jenis belanja penyelenggaraan pemerintah pusat yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain dan transfer ke daerah. Namun permasalahannya adalah seberapa besar belanja pemerintah ini mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. APBN berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah melalui alokasi dana kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang bertugas melaksanakan program-program pembangunan nasional dan regional. Sampai dengan Semester II Tahun 2021 di Sumatera Barat terdapat 40 K/L (termasuk BA-BUN) yang menerima alokasi dana dari APBN mencakup belanja operasional (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial), belanja modal, serta belanja transfer. Melalui belanja pemerintah pusat yang diarahkan pada proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas layanan publik, APBN berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi regional (Putra, 2007). Penelitian oleh Rachmawati (2019) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja operasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut didukung oleh Styawan (2021) yang menyatakan bahwa belanja operasional yang bersumber dari APBD memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Rizky Airy et al. (2021) mendapati hasil berbeda dimana belanja daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Anasmen (2009) juga menyatakan bahwa belanja modal pemerintah yang bersumber dari APBD tidak signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB.

Studi yang mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengaruh belanja pemerintah daerah melalui APBD sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini berfokus pada pengaruh belanja pemerintah pusat melalui APBN di Sumatera Barat. Sumatera Barat, sebagai provinsi yang dikenal dengan potensi ekonominya yang besar, termasuk kekayaan sumber daya alam dan sektor pariwisata yang berkembang, memerlukan analisis yang lebih dalam untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti investasi, infrastruktur, dan kebijakan lokal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya. Pada penelitian ini juga ditambahkan variabel lain yakni populasi penduduk, untuk mengeksplorasi bagaimana variabel-variabel ekonomi makro dan mikro secara khusus mempengaruhi



pertumbuhan di daerah ini, mengingat peran strategis Sumatera Barat dalam perekonomian nasional. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mendalami sejauh mana pengaruh belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dengan penambahan variabel jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Menurut Rahmat (2015), pembangunan ekonomi suatu daerah adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan berkelanjutan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik. Teori Keynes menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan moneter dan fiskal, seperti pengelolaan sistem perpajakan dan peningkatan belanja pemerintah (Candra Fajri Ananda, 2023).

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana ditemukan oleh Yuniarto (2021) bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Samarinda. Darma (2021) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo.

Pertumbuhan penduduk yang konsisten dapat meningkatkan produktivitas dan output ekonomi, serta mengurangi angka kemiskinan melalui penciptaan peluang ekonomi dan peningkatan akses terhadap sumber penghasilan yang stabil. Penelitian ini akan melihat apakah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Belanja Operasional

Belanja operasional yang bersumber dari APBN mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial. Penelitian Rheza et al. (2015) menemukan bahwa belanja operasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ayu (2020) juga menemukan bahwa belanja pegawai dan belanja barang berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pengeluaran untuk honorarium, upah, dan operasional sehari-hari satker memainkan peran strategis dalam mendukung layanan publik dan meningkatkan konsumsi domestik. Penelitian ini akan melihat apakah belanja operasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta infrastruktur. Namun, dalam jangka pendek, efek belanja modal pada pertumbuhan ekonomi mungkin tidak langsung terlihat karena siklus pelaksanaan proyek yang panjang. Penelitian Styawan (2021) dan Waryanto (2017) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penelitian ini akan melihat apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Belanja Transfer

Belanja transfer, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur jangka panjang. Penelitian Sulaeman & Silvia (2019) menemukan bahwa transfer daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa belanja transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat, mungkin karena penyerapan dan penggunaan yang belum efisien serta hambatan dalam implementasi proyek.



Penelitian ini akan melihat apakah belanja transfer berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas melalui pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan kombinasi dari data *cross section* dan data *time series*, di mana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda-beda (Ghozali, 2013). Menurut Ghozali (2013), penggunaan data panel memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan dengan data *cross section* maupun data *time series*. Keuntungan tersebut diantaranya data panel memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* maupun *time series*.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu dokumentasi dengan pengumpulan bahan-bahan dan data yang berhubungan dengan pokok bahasan mengenai belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh secara online bersumber dari situs resmi <http://ditpa.kemenkeu.go.id/> dan <http://sumbar.bps.go.id/>. Variabel dependen dan variabel independen pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3. Data penelitian ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk menormalkan distribusi data dan mengurangi dampak outlier, sehingga mempermudah interpretasi hubungan antar variabel dalam analisis regresi.

Tabel 3. Variabel Penelitian

Variabel Dependen	Satuan	Skala Data	Transformasi Data
PDRB	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Variabel Independen	Satuan	Skala Data	Transformasi Data
Jumlah Penduduk	Jiwa	Rasio	Logaritma Natural
Belanja Operasional	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Belanja Modal	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Belanja Transfer	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural

Sumber: data diolah (2023)

Penelitian ini berfokus pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan periode penelitian selama lima tahun mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penelitian menggunakan alat analisis regresi data panel yang diolah dengan aplikasi STATA versi 18. Berdasarkan hipotesis dan variabel yang telah ditentukan, maka penelitian ini akan menggunakan model penelitian persamaan sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{JumlahPenduduk}_{it} + \beta_2 \text{BelanjaOperasional}_{it} + \beta_3 \text{BelanjaModal}_{it} + \beta_4 \text{BelanjaTransfer}_{it} + \text{eit}$$

Pemilihan Model Data Panel

Dalam perhitungan model regresi data panel terdapat tiga pendekatan yakni *pooled least square/common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Pemilihan model terbaik dari ketiga model tersebut dilakukan melalui tiga jenis uji sebagaimana tabel 4 yaitu uji Chow, uji *Langrange Multiplier* (LM), dan uji Hausman (Hakim, 2014).

Tabel 4. Uji Pemilihan Model Panel

Uji Model Panel	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif
Uji Chow	<i>Pooled/common effect</i> lebih baik daripada <i>random effect</i>	<i>Random effect</i> lebih baik daripada <i>pooled/common effect</i>
Uji LM	<i>Pooled/common effect</i> lebih baik daripada <i>fixed</i>	<i>Fixed effect</i> lebih baik daripada <i>pooled/common effect</i>



Uji Hausman

Random effect lebih baik
daripada *fixed*

Fixed effect lebih baik daripada
random effect

Sumber: data diolah (2023)

Pengujian Asumsi Klasik

Setelah melakukan pemilihan model terbaik, lalu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik merupakan prasyarat dalam analisis regresi yang menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan metode estimasi OLS meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Namun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi dengan metode OLS (Basuki & Prawoto, 2015). Uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 5. Kriteria dalam menolak hipotesis nol adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha, dalam penelitian ini nilai alpha yang digunakan adalah $\alpha=0,05$.

Tabel 5. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif
Uji Normalitas	Data terdistribusi normal	Data tidak terdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	Model Non multikolinearitas	Model multikolinearitas
Uji Heterokedastisitas	Varian data homokedastis	Varian data heterokedastis
Uji Autokorelasi	Model Non-Autokorelasi	Model autokorelasi

Sumber: data diolah (2023)

Pengujian Hipotesis

Setelah pemilihan model terbaik yang sesuai dengan asumsi klasik, langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan tingkat signifikansi. Dalam penelitian ini, pengujian signifikansi sebagaimana tabel 6 meliputi uji koefisien determinasi (R^2) yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, kemudian untuk mengetahui dampak dari masing-masing variabel independen secara parsial, dilakukan uji t, sedangkan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen, digunakan uji F.

Tabel 6. Uji Signifikansi

Uji Signifikansi	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif	Tolak H0
Uji R^2	$R^2 > 0,05$		
Uji F	Semua variabel tidak berpengaruh	Minimal 1 variabel memiliki efek signifikan	Nilai probabilitas < 0,05
Uji T	Variabel independen tertentu tidak berpengaruh	Variabel independen berpengaruh	Nilai probabilitas < 0,05

Sumber: data diolah (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi ini diawali dengan pelaksanaan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dari tiap variabel yang diteliti selama jangka waktu penelitian. Analisis deskriptif terhadap variabel dependen maupun variabel independen menunjukkan nilai minimal, maksimal, dan rata-rata dari variabel yang akan diuji. Hasil dari analisis deskriptif ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Analisis Deskriptif

Variabel	Mean	Maksimum	Minimum
PDRB	8,88e+12	4,52e+13	2,31e+12
Jumlah Penduduk	286941,8	950871	52422
Belanja Operasional	4,29e+11	5,35e+12	6,70e+10



Variabel	Mean	Maksimum	Minimum
Belanja Modal	9,16e+10	1,98e+12	8,30e+8
Belanja Transfer	1,23e+11	3,33e+11	1,78+10

Sumber: data diolah (2023)

Nilai rata-rata PDRB di Sumatera Barat tercatat sebesar Rp8,88 triliun. Pencapaian PDRB tertinggi tercatat sebesar Rp45,2 triliun yang berlokasi di Kota Padang pada tahun 2021, sedangkan nilai terkecil adalah Rp2,31 triliun yang terdapat di Kota Padang Panjang pada tahun 2017. Secara demografis, jumlah penduduk rata-rata di Sumatera Barat berjumlah 286.942 orang. Jumlah penduduk terbanyak tercatat sebanyak 950.871 orang di Kota Padang pada tahun 2017, sementara jumlah penduduk terkecil adalah 52.422 orang yang terdapat di Kota Padang Panjang pada tahun yang sama. Dalam hal belanja operasional, nilai rata-ratanya mencapai Rp429 miliar, dengan alokasi tertinggi sebesar Rp5,35 triliun di Kota Padang pada tahun 2021 dan terendah sebesar Rp67 miliar di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021. Untuk belanja modal, rata-rata dana yang dikeluarkan adalah Rp91,6 miliar, dengan belanja modal tertinggi sebesar Rp1,98 triliun di Kota Padang pada tahun 2019 dan yang terendah adalah Rp830 juta di Kota Sawahlunto pada tahun yang sama. Terakhir, belanja transfer rata-rata di Sumatera Barat adalah Rp123 miliar, dengan dana transfer terbanyak sebesar Rp333 miliar yang dialokasikan ke Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019, dan yang paling sedikit adalah Rp17,8 miliar yang dialokasikan ke Kota Bukittinggi pada tahun 2021.

Salah satu prasyarat dalam penggunaan model regresi panel adalah tidak adanya multikolinearitas yang signifikan antara variabel-variabel independen, yang dapat diindikasikan melalui nilai Faktor Inflasi Varians (*Varian Inflation Factor - VIF*) yang lebih rendah dari 10. Dalam penelitian ini, setiap variabel independen menunjukkan nilai VIF yang berada di bawah angka 10 (lihat Tabel 8). Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen yang diintegrasikan ke dalam model telah memenuhi prasyarat bebas dari asumsi multikolinearitas.

Tabel 8. Tes Multikolinearitas

Variabel	VIFs
lnJumlah Penduduk	4.97
lnBelanja Operasional	4.87
lnBelanja Modal	3.08
lnBelanja Transfer	2.46

Sumber: data diolah (2023)

Sebelum melangkah pada analisis yang lebih mendalam, pemilihan model regresi panel dilakukan dengan menggunakan serangkaian tes yang telah diuraikan pada bagian metode. Tabel 9 menyajikan hasil dari uji pemilihan model panel tersebut. Berdasarkan hasil tes tersebut, random effect model dipilih sebagai model yang paling tepat untuk mengilustrasikan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa kriteria tes, dimana pada uji Chow, nilai probabilitas tercatat lebih rendah dari ambang batas $\alpha=0,05$, pada uji LM, nilai probabilitas juga lebih rendah dari $\alpha=0,05$, dan pada uji Hausman, nilai probabilitas lebih tinggi dari $\alpha=0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *random effect model* lebih baik daripada *fixed model* dan *pooled model*.

Tabel 9. Uji Model Panel

Jenis Uji	Nilai Statistik Uji	Nilai Probabilitas	Kesimpulan
Uji LM BP	135.44	0.00	<i>Random effect</i> lebih baik daripada <i>pooled/common effect</i>



Uji Chow	47.10	0.00	<i>Fixed effect</i> lebih baik daripada <i>pooled/common effect</i>
Uji Hausman	3.22	0.5221	<i>Random effect</i> lebih baik daripada <i>fixed effect</i>

Sumber: data diolah (2023)

Setelah menetapkan model regresi panel yang paling sesuai, interpretasi terhadap model tersebut tidak segera dilakukan, melainkan diawali dengan pelaksanaan pengujian asumsi klasik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa model yang dipilih memang layak untuk digunakan dalam menganalisis efek prediktif. Asumsi yang diuji mencakup normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Berdasarkan hasil yang dipaparkan dalam Tabel 10, asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas telah terpenuhi, ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari $\alpha=0,05$ dan nilai Faktor Inflasi Varians (VIF) yang lebih rendah dari 10. Namun, terdapat indikasi pelanggaran asumsi autokorelasi, dengan nilai probabilitas yang lebih rendah dari $\alpha=0,05$, sehingga mengarah pada penolakan hipotesis nol dan disimpulkan terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 10. Uji Asumsi Klasik

Uji	Nilai Uji	Nilai Probabilitas	Kesimpulan
Uji Normalitas	4.39	0.1112	Normal
Uji Multikolinearitas	3.84		Non Multikolinearitas
Uji Heterokedastisitas	1.21	0.2709	Homokedastisitas
Uji Autokorelasi	39.154	0.0000	Autokorelasi

Sumber: data diolah (2023)

Karena terdapat pelanggaran asumsi autokorelasi, model random ditransformasikan menggunakan model *Panel Corrected Standard Error (PCSE)* (Greene, 2018). Model Panel dengan PCSE adalah metode statistik yang dirancang untuk mengatasi masalah autokorelasi dan heterokedastisitas dalam data panel, khususnya dalam konteks *random effect model*. PCSE memberikan solusi dengan mengoreksi standar error dari estimasi koefisien agar lebih akurat dalam kondisi autokorelasi dan heterokedastisitas. Dengan menerapkan koreksi ini, model PCSE memungkinkan peneliti untuk mendapatkan inferensi statistik yang lebih tepat dan reliabel, meskipun ada keberadaan autokorelasi dan heterokedastisitas dalam data. Adapun model final yang digunakan dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	T Statistik	Probabilitas	Kesimpulan Hipotesis
InJumlah Penduduk	0.645207	21.27	0.000	H1 diterima
InBelanja Operasional	0.258986	9.67	0.000	H2 diterima
InBelanja Modal	0.010900	1.13	0.260	H3 ditolak
InBelanja Transfer	0.015460	21.27	0.521	H4 ditolak
<i>Constant</i>	14.232	18.39	0.000	
<i>R-Square</i>	0.9999	Wald Chi2	7646.65	
<i>Prob > Chi2</i>	0,0000			

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0.9999. Nilai koefisien ini berarti bahwa semua variabel independen dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB sebesar 99,99 persen; sisanya 0,01 persen dipengaruhi variabel lain di luar model. Pada uji Wald Chi2 yang merupakan pengganti uji F dalam konteks regresi data panel dengan model PCSE, menunjukkan nilai 7646.65 dengan nilai probabilitas yang mendekati nol ($\text{Prob} > \text{Chi2} = 0.0000$). Hal ini menunjukkan bahwa, secara



keseluruhan, model ini memiliki signifikansi statistik yang tinggi, yang berarti setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dari uji parsial yang diidentifikasi dengan nilai probabilitas uji t menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan variabel belanja operasional memiliki dampak positif dan signifikan terhadap PDRB dimana nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 atau kurang dari $\alpha=0,05$. Sedangkan untuk variabel belanja modal dan variabel belanja transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan nilai probabilitas lebih dari $\alpha=0,05$. Persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$\ln PDRB = 14.232 + 0.645207 \ln \text{JumlahPenduduk} + 0.258986 \ln \text{BelanjaOperasional} + 0.010900 \ln \text{BelanjaModal} + 0.0154603 \ln \text{BelanjaTransfer}$$

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas variabel independen X1 atau jumlah penduduk yang memiliki signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif bernilai 0.645207, sehingga H1 diterima dalam artian bahwa setiap peningkatan 1 persen jumlah penduduk akan memberikan dampak positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar 0,645 persen dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochaida (2016) yang menemukan bahwa meningkatnya jumlah penduduk di Kalimantan Timur membawa perkembangan bagi perekonomian. Darma (2021) menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2016-2020.

Pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat dianggap sebagai motor penggerak ekonomi yang memfasilitasi ekspansi pasar dan produksi. Dengan bertambahnya penduduk, terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa yang dapat merangsang investasi dan produksi lokal. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat siklus ekonomi lokal. Jumlah tenaga kerja di Sumatera Barat yang meningkat konsisten selama periode 2017-2021 berpotensi meningkatkan produktivitas dan output ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan melalui penciptaan peluang ekonomi dan peningkatan akses terhadap sumber penghasilan yang stabil. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan pertumbuhan penduduk dalam kerangka kebijakan ekonomi yang lebih luas, yang tidak hanya mendorong kuantitas tenaga kerja, tetapi juga kualitasnya. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis dan ekonomi global yang terus berubah.

Pengaruh Belanja Operasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas variabel independen X2 atau belanja operasional yang memiliki signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif bernilai 0.258986, sehingga H2 diterima dalam artian bahwa setiap peningkatan 1 persen belanja operasional akan memberikan dampak positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar 0,259 persen dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rheza et al. (2015) yang menjelaskan bahwa belanja operasional merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan, belanja operasional yang bersumber dari APBN juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Ayu (2020) menemukan bahwa belanja pegawai dan belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh signifikan tersebut didongkrak oleh porsi belanja pegawai yang lebih besar dari belanja barang dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai yang dialokasikan pada 40 K/L di Sumatera Barat bersumber dari APBN yang digunakan untuk pengeluaran honorarium atau



upah dalam melaksanakan program kegiatan K/L di banyak satuan kerja (satker), termasuk di dalamnya gaji pegawai yang bersifat rutin dan tunjangan lainnya baik pegawai tetap maupun honor. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik tetapi juga meningkatkan daya beli pegawai, yang selanjutnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik. Belanja barang yang meliputi pengeluaran untuk kegiatan operasional harian, memainkan peran strategis dalam mendukung operasional sehari-hari satker, yang secara langsung berkontribusi pada kelancaran proses administrasi dan pembangunan. Belanja untuk perjalanan dinas juga menstimulasi sektor perjalanan dan pariwisata lokal, memberikan dampak ekonomi langsung di daerah. Belanja bantuan sosial seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui program bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu praKerja memberikan dukungan langsung kepada penduduk yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi pada stabilitas sosial yang merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengevaluasi dan menganalisis efektivitas penggunaan belanja operasional untuk memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara optimal.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas variabel independen X3 atau belanja modal memiliki signifikansi sebesar 0,260 atau lebih besar dari 0,05 dengan koefisien positif bernilai 0.010900, sehingga H3 ditolak karena variabel belanja modal tidak signifikan secara statistik sehingga tidak berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini bertentangan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa belanja modal yang bersumber dari APBD memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti pada penelitian Styawan (2021) yang menjelaskan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang pada tahun 2004-2018. Penelitian oleh Waryanto (2017) membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2020) yang menemukan bahwa belanja pegawai dan belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Belanja modal yang bersumber dari APBN meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta pembangunan infrastruktur seperti belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Efeknya pada pertumbuhan ekonomi mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek. Proyek-proyek infrastruktur besar sering kali memiliki siklus pelaksanaan yang panjang, dengan manfaat ekonomi yang merata seiring waktu, yang mungkin melampaui jangka waktu penelitian. Selain itu, belanja modal di Sumatera Barat juga mengalami hambatan karena berbagai faktor administratif, seperti keterlambatan dalam pengadaan dan penyerapan anggaran yang tidak optimal, kegiatan pelaksanaan proyek yang batal kontrak/tidak jadi dilaksanakan disebabkan gagal lelang atau tidak tersedia jenis barang di *e-catalog*. Belanja modal yang biasanya dikebut di akhir tahun juga membuat dampak belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan PDRB menjadi kurang maksimal. Terkendalanya proyek infrastruktur nasional yaitu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Padang-Pekanbaru yang mulai dibangun sejak tahun 2018 juga membuat daya ungkit belanja modal konstruksi tidak terealisasi dengan baik, padahal proyek strategis nasional tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian menjadi lebih berkembang.



Pengaruh Belanja Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas variabel independen X4 atau belanja transfer memiliki signifikansi sebesar 0,521 atau lebih besar dari 0,05 dengan koefisien positif bernilai 0.015460, sehingga H4 ditolak karena variabel belanja transfer tidak signifikan secara statistik sehingga tidak berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini bertentangan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti pada penelitian Sulaeman & Silvia (2019) yang menemukan bahwa transfer daerah dalam hal ini dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan.

Belanja transfer di Sumatera Barat terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang difokuskan untuk mendukung akselerasi peningkatan SDM, infrastruktur, dan daya saing daerah. Temuan bahwa belanja transfer tidak menunjukkan signifikansi statistik yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional disebabkan beberapa faktor diantaranya penyerapan dan penggunaan belanja transfer oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya efisien dan efektif. Terdapat potensi penundaan atau hambatan dalam implementasi proyek yang didanai oleh belanja transfer, yang mungkin mengurangi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Kemudian, dana alokasi khusus dan dana desa diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau infrastruktur jangka panjang yang tidak langsung berkontribusi pada indikator PDRB jangka pendek.

PENUTUP

Simpulan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Sumatera Barat. Variabel jumlah penduduk dan belanja operasional menunjukkan pengaruh positif yang signifikan: meningkatnya jumlah penduduk dan belanja operasional berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, variabel belanja modal dan belanja transfer, meskipun memiliki koefisien yang positif, tidak menunjukkan bukti signifikansi statistik yang cukup untuk dikatakan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat.

Saran

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan agar alokasi belanja modal mendapat perhatian lebih mendalam dari Kementerian/Lembaga, mengingat peranannya yang krusial dalam memajukan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Investasi dalam infrastruktur memiliki dampak signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya dinamis tetapi juga terdistribusi secara adil di seluruh wilayah. Sehingga, kebijakan pembangunan infrastruktur hendaknya diarahkan untuk mencapai pemerataan. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa alokasi belanja transfer sesuai dengan kebutuhan spesifik dan prioritas pembangunan daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima tahun (2017-2021), penelitian mendatang diharapkan dapat menganalisis tren dalam jangka panjang atau menggunakan data terkini. Penelitian berikutnya diharapkan memperluas sumber data mencakup APBD untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana alokasi dana pemerintah secara spesifik berkontribusi pada



pertumbuhan ekonomi regional. Disamping itu juga dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel kontrol seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, investasi asing langsung, maupun kebijakan pemerintah lokal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasmen. (2009). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat : 2000-2006.
- Ayu, M. (2020). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat (Persen), 2020-2022. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/157/178/1/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-sumatera-barat-.html>
- Candra Fajri Ananda. (2023, February 13). Isu Strategis dalam Kebijakan Fiskal. Isu Strategis dalam Kebijakan Fiskal
- Darma, B. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020.
- Darma, B., & Wulansari, K. Y. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2020.
- DJPb. (2021, September 8). Penyaluran Dana Transfer (DAK Fisik, Dana Desa, Dana BOS). <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/bekasi/id/layanan/layanan-kppn-bekasi/seksi-bank/penyaluran-dana-transfer-dak-fisik,-dana-desa,-dana-bos.html>
- Dwi Afriadi, R., Sutrasna, Y., & Gabriel Josstenz, T. (2020). Pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Negara-Negara Asia Emerging Economies. <https://www.businessinsider.com/jim-oneill->
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 update PLS regresi.
- Gosal Juwenda Siska, Ch. P. Lopian Agnes Lutherani, & Masloman Irawaty. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2005-2021.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis* (8th ed).
- Hakim, L. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Dan Bali).
- Issha Harruma. (2022). Pengaruh APBN dan APBD bagi Perekonomian Rakyat Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pengaruh APBN dan APBD bagi Perekonomian Rakyat”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/00300001/pengaruh-apbn-dan-apbd-bagi-perekonomian-rakyat>
- KPPN Kotabumi. (n.d.). Klasifikasi Anggaran. Retrieved January 22, 2024, from <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-kemenkeu/klasifikasi-anggaran.html>
- Lantu Yeni Saarce Magdalena, Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, T. O. (2017). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Bitung.
- Putra, N. G. (2007). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (2005-2008).



- Putri Rizky Airy, Zamzami, & Rahmadi Selamat. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Vol. 10, Issue 2).
- Rachmawati, R. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Belanja Operasi dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Sumatera Barat.
- Rahmat, W. F. (2015). Kajian Teori dan Implementasi Pembangunan Terhadap Tolak Ukur Keberhasilan Pembangunan.
- Rheza, B., Damanik, M. I., Agustine, T. E., & Sianturi, M. N. (2015). Optimalisasi Fiskal Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD.
- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur.
- Styawan, H. A. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2004-2018. In Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Wikipedia. (2023). Jalan Tol Padang–Sicincin. https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Padang%E2%80%93Sicincin
- Yunianto, D. (2021). Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. FORUM EKONOMI, 23(4), 687–698. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>